

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : MEMBANGUN GENERASI KRITIS DAN PARTISIPASIF

Gita Sihombing¹, Merlin Rumahorbo², Venty Togatorop³, Yohana Manullang⁴, Eva Hutahaean⁵, Desry Sinaga⁶, Prini Ambarita⁸

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Nommensen, Pematangsiantar

E-mail: *gitasihombinh@gmail.com¹

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia bertujuan membentuk warga negara yang demokratis, kritis, dan bertanggung jawab. Namun, pelaksanaannya di sekolah-sekolah masih didominasi oleh pendekatan teoritis dan metode ceramah yang kurang melibatkan partisipasi aktif siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan untuk mengkaji kesenjangan antara tujuan ideal PKn dengan praktiknya di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik pemuda, seperti dalam pemilu lokal, mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan guru, tidak adanya pendekatan pembelajaran kontekstual, serta minimnya integrasi isu sosial-politik aktual menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendekatan pembelajaran melalui strategi seperti debat, simulasi musyawarah, pembelajaran berbasis proyek, dan literasi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dan mendorong reformasi kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang lebih progresif dan partisipatif.

Kata kunci

Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Partisipasi Pemuda, Pembelajaran Kritis, Reformasi Kurikulum

ABSTRACT

Civic Education (PKn) in Indonesia aims to foster democratic, critical, and responsible citizens. However, its implementation in schools is still dominated by theoretical approaches and lecturing methods that lack active student participation. This study employs a qualitative approach through literature review to examine the gap between the ideal goals of PKn and its practices in the field. The study reveals that the low level of youth political participation, such as in local elections, reflects the weak internalization of democratic values in learning. Previous studies also indicate that inadequate teacher training, lack of contextual learning approaches, and minimal integration of actual socio-political issues are major obstacles. Therefore, a transformation of learning approaches is necessary through strategies such as debates, deliberation simulations, project-based learning, and digital literacy. This study aims to enrich academic discourse and encourage reform of civic education policies to be more progressive and participatory.

Keywords

Civic Education, Democracy, Youth Participation, Critical Learning, curriculum reform

1. PENDAHULUAN

Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam upaya membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Demokrasi berasal dari kata Yunani “*demos*” (rakyat) dan “*kratos*” (kekuasaan), yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi juga sebuah nilai hidup yang menekankan pentingnya kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan publik (Dahl, 1989). Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini, dan Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) menjadi instrumen strategis dalam proses tersebut. PKn tidak hanya mengajarkan norma dan hukum negara, tetapi juga membentuk kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya, serta melatih kemampuan berpikir kritis, berdialog, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan juga sarat dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi ideologis bangsa. Melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan prinsip demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi fondasi utama dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menjadi bagian aktif dalam sistem demokrasi yang sehat. Dengan demikian, membangun generasi kritis dan partisipatif tidak cukup hanya melalui proses politik, tetapi harus melalui pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kewargaan yang reflektif, terbuka, dan peduli terhadap kehidupan bersama.

Sayangnya, berbagai studi dan realita lapangan menunjukkan bahwa implementasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih cenderung normatif dan hafalan, sehingga kurang efektif dalam membentuk generasi yang benar-benar demokratis dan partisipatif.

Data sensus dan survei terbaru menunjukkan tren stagnasi partisipasi pemilih muda dalam politik lokal. Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, nilai IDI nasional berada di angka 74,39 (kategori sedang), dengan indikator partisipasi politik masyarakat yang justru mengalami penurunan, terutama di kalangan pemuda usia 17–24 tahun. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 22,7% pemuda usia 18–24 tahun yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 di tingkat lokal (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam melibatkan generasi muda dalam proses demokrasi di tingkat lokal, dan juga berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, nilai IDI nasional berada di angka 74,39 (kategori sedang), dengan indikator partisipasi politik masyarakat yang justru mengalami penurunan di beberapa provinsi, seperti Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktural demokrasi telah berjalan, tetapi secara substansial masih menghadapi hambatan partisipatif, terutama dari generasi muda. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ideal dengan praktiknya di lapangan.

Dalam konteks inilah penting untuk melihat bagaimana pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen pembentukan karakter demokratis dan sebagai ruang pembelajaran politik yang membangkitkan kesadaran kritis. Kondisi ini mengindikasikan adanya jurang antara pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah dan kesadaran politik yang teraktualisasi di lapangan. Beberapa penelitian telah mencoba mengurai relasi antara pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan sikap demokratis, seperti studi dari Susanto (2021) yang menyatakan bahwa PKn di sekolah menengah memiliki potensi besar dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, tetapi kurang menyentuh aspek keterlibatan nyata dalam isu publik. Penelitian lain oleh Suryani & Maulida (2022) menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi dan debat mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun, pembelajaran ini belum merata diterapkan di seluruh sekolah. Penelitian oleh Rahmawati (2020) juga mengungkap bahwa guru PKn masih mengandalkan metode ceramah dan kurang memberdayakan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Di sisi lain, studi oleh Nugroho (2023) menekankan pentingnya integrasi pendidikan media dalam PKn untuk menangkal disinformasi, namun belum

banyak menggali bagaimana siswa mempraktikkan sikap kritis terhadap informasi yang berseliweran di ruang digital. Sementara itu, Prasetya (2022) menyoroti bahwa kurikulum PKn cenderung kurang responsif terhadap dinamika sosial-politik lokal yang sebenarnya dapat menjadi bahan ajar kontekstual.

Kelima studi di atas menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya memperkuat pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembentukan warga negara demokratis, masih terdapat keterbatasan dalam hal pendekatan pedagogis, relevansi materi, dan pelibatan siswa secara langsung dalam kehidupan demokratis. Di sinilah letak celah penelitian yang coba diisi oleh studi ini, yaitu dengan mengeksplorasi bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat benar-benar memfasilitasi pembentukan generasi yang tidak hanya memahami demokrasi secara teoritik, tetapi juga memiliki kesadaran kritis dan keberanian untuk terlibat secara aktif dalam berbagai isu sosial-politik di lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini berusaha memberikan pendekatan berbeda dengan menempatkan pengalaman dan suara siswa sebagai pusat analisis, mengevaluasi peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran demokrasi, dan menelaah keterkaitan antara isi kurikulum PKn dengan praktik partisipasi politik generasi muda. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan baru dalam pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada penguatan kapasitas berpikir kritis, pengalaman langsung dalam kehidupan berdemokrasi, dan penguatan karakter kewargaan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dalam bidang pendidikan kewarganegaraan serta memberikan kontribusi nyata terhadap praktik pembelajaran di sekolah. Lebih jauh, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih progresif, demokratis, dan berorientasi pada pembentukan karakter warga negara yang tangguh di tengah kompleksitas zaman.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Sehingga penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) adalah memunculkan ide-ide terbaru dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), penelitian dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan memanfaatkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang berasal dari buku dan jurnal-jurnal ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian pustaka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan kewarganegaraan di berbagai satuan pendidikan masih menghadapi sejumlah kendala signifikan. Salah satu hambatan utama adalah pendekatan

pembelajaran yang masih didominasi metode ceramah, sehingga kurang mendorong partisipasi aktif peserta didik. Hal ini berdampak pada terbatasnya penghayatan nilai-nilai demokrasi secara mendalam di kalangan siswa. Temuan dari Harahap dan Surlianti (2023) mengungkapkan bahwa proses pembelajaran PKn di banyak sekolah masih bersifat teoritis dan minim pengalaman partisipatif seperti debat terbuka, simulasi musyawarah, atau kegiatan sosial yang merepresentasikan praktik demokrasi. Studi mereka di MTs Muhammadiyah 22 Padangsidempuan mencatat bahwa hanya sekitar 35% siswa yang mampu menjelaskan secara aplikatif nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 memperlihatkan adanya penurunan tingkat partisipasi politik pemilih muda, khususnya pada Pilkada 2024. Misalnya, di Provinsi Sumatera Barat, hanya 22% pemuda berusia 17–25 tahun yang menggunakan hak pilihnya. Data ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual demokrasi dengan keterlibatan aktual generasi muda dalam proses politik. Penelitian yang dilakukan oleh Asmaroini dan Utami (2017) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan demokrasi di tingkat SMA di Kabupaten Ponorogo masih bersifat tekstual dan belum memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk terlibat langsung dalam dinamika organisasi sekolah seperti OSIS atau forum kelas. Hal ini menyebabkan lemahnya keterampilan demokratis yang bersifat praktis.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Taqiuddin dan rekan-rekannya (2023) mengenai peran organisasi kemahasiswaan dalam penguatan nilai-nilai demokrasi menunjukkan bahwa forum seperti BEM dan UKM sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan demokrasi informal. Mahasiswa dilatih untuk bermusyawarah, menyusun program kerja, dan menyampaikan aspirasi. Namun, partisipasi masih belum merata karena terbatasnya dukungan pembinaan dari institusi kampus. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan kewarganegaraan secara formal telah diintegrasikan dalam kurikulum nasional, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif. Tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya metode pembelajaran inovatif, minimnya pelatihan guru dalam pembelajaran demokratis, dan terbatasnya ruang aktualisasi siswa dalam kegiatan sosial-politik. Marzuki dan Basri (2022) menekankan pentingnya transformasi pembelajaran PKn agar tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga mengajak siswa untuk terlibat langsung dalam aktivitas kemasyarakatan seperti forum anak, kampanye lingkungan, maupun kegiatan desa sadar hukum.

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk generasi muda yang demokratis sangat ditentukan oleh kemampuan guru dan sekolah dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran yang kontekstual, reflektif, dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan nyata. Jika tidak, maka PKn akan tetap menjadi mata pelajaran hafalan yang gagal menumbuhkan karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Dari hasil kajian pustaka dan analisis terhadap berbagai literatur serta data empiris, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai tujuannya, yakni membentuk warga negara yang kritis, demokratis, dan aktif dalam kehidupan sosial-politik. Walaupun secara konsep PKn telah diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik generasi muda, praktiknya di lapangan

masih cenderung bersifat teoritis dan kurang memberikan ruang partisipatif kepada peserta didik. Permasalahan utama yang diidentifikasi antara lain: Metode pembelajaran yang masih berfokus pada ceramah dan penghafalan, Minimnya keterlibatan siswa dalam praktik demokrasi secara nyata, Kurangnya pelatihan dan pendampingan terhadap guru dalam metode pembelajaran demokratis, serta Isi kurikulum yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan isu sosial dan politik lokal. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pemilu sebagaimana tercermin dalam data BPS tahun 2023 mempertegas adanya kesenjangan antara pemahaman siswa tentang demokrasi dan keterlibatan mereka dalam praktik politik. Meskipun terdapat beberapa contoh pendekatan alternatif seperti diskusi kelas, kegiatan OSIS, dan pendidikan nonformal di tingkat mahasiswa, pelaksanaannya belum menyeluruh dan belum menjadi bagian dari sistem pembelajaran yang terstruktur. Dengan demikian, diperlukan pembaruan dalam pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial, mendorong keterlibatan aktif siswa, dan memberi ruang pada pengalaman belajar yang aplikatif. Guru diharapkan mampu mengembangkan strategi pembelajaran interaktif seperti debat, simulasi musyawarah, proyek sosial, serta pendidikan literasi digital agar siswa lebih siap menghadapi tantangan demokrasi modern. Melalui pendekatan yang demikian, PKn dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga memiliki kesadaran dan keberanian untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat secara reflektif dan bertanggung jawab.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asmaroini, A. P., & Utami, P. S. (2017). PELAKSANAAN PENDIDIKAN DEMOKRASI SISWA SMA DI KABUPATEN PONOROGO. *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1). Retrieved from <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/138>
- Asmaroini, A. P., & Utami, P. S. (2017). Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi Siswa SMA di Kabupaten Ponorogo. *JPPKn*, 2(1). <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/138>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Demokrasi Indonesia*. <https://www.bps.go.id>
- BPS. (2023). Indeks Demokrasi Indonesia 2023. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/publication>
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Harahap, R., & Surlanti, S. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran PKN. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2(02). <https://doi.org/10.37081/kwn.v2i02.1663>
- Harahap, R., & Surlanti, S. . (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PKN SISWA KELAS VII DI MTS MUHAMMADIYAH 22 PADANGSIDIMPUAN. *JURNAL KEWARGANEGARAAN*, 2(02). <https://doi.org/10.37081/kwn.v2i02.1663>
- Hoskins, B., & Crick, R. D. (2010). Competences for Learning to Learn and Active Citizenship: Different currencies or two sides of the same coin?. *European Journal of Education*, 45(1), 121–137. <https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01419.x>

- Marzuki, M., & Basri, H. (2022). Transformasi pendidikan kewarganegaraan berbasis aksi sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 27(3), 205–218. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v27i3.593>
- Nugroho, T. (2023). Literasi Digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Intervensi Pendidikan*, 4(2), 41–53. <https://doi.org/10.36765/jrip.v4i2.503>
- Prasetya, D. (2022). Relevansi Kurikulum PKN dengan Konteks Sosial Politik Lokal. *Jurnal Kajian Kewarganegaraan*, 5(2), 112–123.
- Rahmawati, A. (2020). Tantangan Guru dalam Implementasi Pembelajaran Kewarganegaraan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1), 73–85.
- Suryani, L., & Maulida, H. (2022). Pembelajaran Demokrasi melalui Metode Debat dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *JPPKn*, 3(1), 56-68. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn>
- Susanto, R. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pembentukan Karakter Demokratis di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2), 134-145.
- Taqiuddin, H. U., et al. (2023). Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wadah Pembelajaran Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan (JRIP)*, 5(1), 37–43. <https://doi.org/10.36765/jrip.v5i1.583>
- Taqiuddin, H. U., Mulianah, B., & Solatiyah, B. (2023). Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah pembelajaran nilai-nilai demokrasi pancasila. *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan (JRIP)*, 5(1), 37-43. <https://doi.org/10.36765/jrip.v5i1.583>